



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Renja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Renja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan, kemandirian, daya saing masyarakat dan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar guna mewujudkan tujuan yang kita cita-citakan bersama. Amiin.



Benteng, 17 Maret 2025
KEPALA PELAKSANA BPBD,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, MM.Pub

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19700726 199101 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA-PD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu dan capaian Renstra-PD	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	31
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD	39
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat .	52
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional	53
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	60
3.3. Program dan Kegiatan	61
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	75
BAB V PENUTUP	91
5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan	91
5.2. Rencana tindak lanjut	91



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD Dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun Berjalan.....	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025	28
Tabel 2.3	Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026	40
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026	52
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPBD Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027	62
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab X menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dalam pasal 273 ayat (2) disebutkan bahwa Renstra-PD dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 1 (satu) tahun. Dokumen Renja-PD mempunyai peranan yang strategis, karena menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dalam prosesnya, penyusunan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal dan merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai kedepan, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Penanggulangan Bencana, berkewajiban juga menyusun rencana Kerja. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah kebijakan perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya dalam penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dituntut mampu menjawab perkembangan lingkungan kerja baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,



serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode tahun 2026 memuat program/kegiatan/sub kegiatan perencanaan dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi, pemanfaatan teknologi Informasi kebencanaan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek perlindungan masyarakat maupun peningkatan indeks intelektual manusia.

Untuk melaksanakan program pembangunan tahun 2026, maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2026 berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Reopublik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;



32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 44);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 47);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
38. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 526);
39. peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja ini adalah untuk menempatkan program Penganggulangan Bencana menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2030, Rencana Tata Ruang Wilayah dan memberikan



gambaran yang menyeluruh terhadap upaya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan.

➤ **Tujuan Internal:**

1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan.
2. Menyediakan dokumen acuan bagi BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan pada setiap tahunnya yang bersumber baik dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan sumber pembiayaan APBN maupun masyarakat.
3. Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di BPBD Kepulauan Selayar dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.
5. Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur di BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan program dan kegiatan.

➤ **Tujuan Eksternal:**

1. Memberikan masukan-masukan terhadap upaya pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang berorientasi untuk Pembangunan yang mengurangi kerentanan terhadap bencana.
2. Memberikan arah kebijakan terhadap upaya penanggulangan bencana, baik dalam kondisi pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana.
3. Memberikan gambaran bagi masyarakat dan pihak swasta daerah bahwa Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar memiliki *concern* yang besar terhadap upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Mensinergikan program-program dan kegiatan penanggulangan bencana dengan program-program dan kegiatan lain yang berkaitan erat dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman risiko bencana, baik di OPD lain, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.
5. Terwujudnya dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk fasilitasi, sinkronisasi dan dukungan anggaran program penanggulangan bencana yang berkelanjutan.



1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun sistematika penyusunan RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 meliputi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB V PENUTUP

- 5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- 5.2. Rencana tindak lanjut



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, telah memenuhi target kinerja ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun hasil evaluasi reviu yang diberikan oleh APIP Kabupaten Kepulauan Selayar pada rancangan Renja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :

1. Kelengkapan dokumen pendukung dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan telaah terdapat dokumen pendukung Renja Perangkat Daerah diketahui bahwa beberapa dokumen pendukung tidak tersedia, yaitu berupa :
 - Laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu dan Laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun berjalan;
 - Berita Acara Forum Perangkat Daerah;
 - Berita Acara Verifikasi Rancangan Awal Renja;
 - Laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan Renja.



2. Kesesuaian rumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan tata cara dan sistematika penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan tahun 2025 adalah seperti tertuang pada tabel 2.1 dibawah ini:



Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025					
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Capaian Kinerja	72.30									
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan	95%									
1	05	01	2.01	A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen atau Laporan perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang di selesaikan tepat waktu	100%								
		01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	44,44%



		01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen		-	-	-	-	-	-
		01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen		-	-	-	-	-	-
		01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	1 Dokumen		-	-	-	-	-	-
		01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	40,00%	
		01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	40,00%	
		01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	5 Laporan	-	-	-	-	-	-	
		01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00%



1	5	01	2.05		D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Kepegawaian Perangkat Daerah	100%								
		01	2.05	0001	Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
		01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-
		01	2.05	0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Pegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
		01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
		01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, , Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
		01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	24 Orang	7 Orang	7 Orang	100%	7 Orang	14 Orang	58,33%		
		01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5	01	2.06		E. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%								
		01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	40,00%		



		01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	5 Unit	-	-	-	-	-	-
		01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	5 Unit	-	-	-	-	-	-
		01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	100 Unit	40 Unit	40 Unit	100%	4 Unit	44 Unit	44,00%
		01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	45 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	10 Unit	22,22%
		01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit aset Tetap Lainnya yang disediakan	5 Unit	-	-	-	-	-	-
		01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 Unit	-	-	-	-	-	-
		01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 Unit	-	-	-	-	-	-
		01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	-	-	-	-	-	-
1	5	01	2.08		G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%						
		01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	-	-	-	-	-	-
		01	2.08	0002	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	40,00%



					Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan								
		01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	40,00%
1	5	01	2.09		H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%							
		01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	40,00%
		01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100 Unit		23 Unit	23 Unit	100%	23 Unit	46 Unit	46%
		01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	5 Unit		-	-	-	-	-	-
		01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	70 Unit		20 Unit	20 Unit	100%	28 Unit	48 Unit	68,57%
		01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap lainnya yang Dipelihara	5 Unit		-	-	-	-	-	-
		01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	5 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	40,00%



		01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/rehabilitasi	5 Unit		-	-	-	-	-	-
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%							
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%							
						Persentase warga negara yang mendapatkan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%							
1	05	03	2.01		A. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%							
1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) yang dilegalisasi	1 Dokumen		-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (per jenis bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada	375 Orang		100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	200 Orang	53,33%



					penyakit/wabah zoonosis prioritas	cepat kejadian luar biasa penyakit/waba prioritas								
1	05	03	2.03	0002	Respon cepat penanganan darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPBD yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	3 Dokumen	60,00%
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	200 Orang		30 Orang	30 Orang	100%	35 Orang	65 Orang	32,50%
1	05	03	2.03	0007	Penyusunan Rencana Operasi kedaruratan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen rencana operasi yang sah/legal	1 Dokumen		-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.03	0008	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam penanganan keadaan darurat kabupaten/kota	Jumlah aparatur SDM BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	2 Orang		-	-	-	3 Orang	3 Orang	150%
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	200 Orang		30 Orang	30 Orang	100%	35 Orang	65 Orang	32,50%
1	05	03	2.03	0010	Respon cepat Bencana Non Alam Epidemik/wabah penyakit	Jumlah Dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam	1 Dokumen		-	-	-	-	-	-



						berdasarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan epidemiologi terpadu								
1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	40,00%
1	05	03	2.04		D. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan sistem dasar penanggulangan Bencana	100%							
1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen regulasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah	5 Dokumen		-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Tata kelola kelembagaan bencana daerah	5 Dokumen		-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.04	0003	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	5 Dokumen		-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Jumlah data dan informasi kebencanaan yang tersedia	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	40,00%
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan bencana	Jumlah Laporan hasil Binwas penyelenggaraan penanggulangan bencana	5 Laporan		-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.04	0007	Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota	Jumlah SDM Aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	5 Orang		-	-	-	-	-	-



1	05	03	2.04	0008	Bimbingan teknis pasca bencana kabupaten/kota	Jumlah aparatur BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah kabupaten/kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P)	5 Orang		-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.04	0009	Penyusunan rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana kabupaten/kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) provinsi yang dilegalkan	5 Dokumen		-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi Penanganan pascabencana kabupaten/kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) Kabupaten/kota yang dilegalkan	5 Kegiatan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Kegiatan	2 Kegiatan	40,00%
1	05	03	2.04	0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana kabupaten/kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana kabupaten/kota meliputi lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi,	5 Lembaga		-	-	-	-	-	-



						lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal								
1	05	03	2.04	0012	Fasilitas pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kabupaten/kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	5 Laporan		-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.04	0013	Penyusunan kajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) kabupaten/kota	Jumlah penyelesaian dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) kabupaten/kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	5 Dokumen		-	-	-	-	-	-



2.2. Analisis kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan selama Tahun 2025, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Selayar berupa dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tentang Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah ditetapkan. Berikut SPM dan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar :

1. Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;
2. Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan salah satu OPD pengampu SPM yaitu Trantibumlinmas yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dasar pada sub urusan bencana berkomitmen untuk melakukan percepatan dalam pemenuhan dan



penerapan SPM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada SPM pada pelayanan sub urusan bencana telah mencapai target setiap tahunnya, namun pencapaian target disini dapat diartikan bahwa target yang dicapai disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diberikan, namun untuk lebih optimalnya pencapaian target program masih sangat membutuhkan alokasi anggaran yang mencukupi untuk memenuhi pelayanan dasar SPM. Oleh karena itu agar komitmen ini dapat berjalan dengan baik dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas dari seluruh *stakeholders* untuk mendukung pencapaian kinerja pelayanan SPM.

Analisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah sebagai pelaksana program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.2.



Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPBD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Anali sis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Indeks Reformasi Birokrasi			32,30	34,24	36,18	38,15	34,24	-	38,15	-	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah			77	77,75	78	78,5	83,33	-	84,00	85,00	
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			65,00 (B)	70,00 (BB)	75,00 (BB)	80,00 (BB)	- (B)	-	80,00 (BB)	80,00 (BB)	
2.	Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)			Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	-	Sesuai	Sesuai	
3.	Persentase layanan pengurangan risiko bencana pada masyarakat			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
4.	Persentase korban bencana yang tertangani			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	



5.	Persentase penanganan pascabencana			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
6.		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
7.		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
8.		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
9.			Persentase warga Negara yang	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	



			memperoleh layanan informasi rawan bencana									
10.			Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
11.			Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

Pada tabel 2.2 Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk realisasi capaian tahun 2025 belum terpenuhi dikarenakan kegiatan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih sementara berjalan.



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD dan Hal Kritis Yang Terkait dengan Pelayanan OPD

Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara geografis terletak di ujung selatan jazirah Sulawesi dan memanjang dari utara ke Selatan dan terdiri dari gugusan pulau-pulau (132 pulau), luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 km², terdiri atas wilayah daratan dengan luas 1.357,03 km² dan luas wilayah laut adalah 9.146,66 km², dengan panjang garis pantai yaitu 670 km.

Kabupaten Kepulauan Selayar berpotensi terhadap bencana alam berupa tsunami, kecelakaan laut, angin kencang, abrasi pantai dan banjir. Hampir semua Desa dan Kelurahan sepanjang pantai barat dan timur serta 26 pulau berpenghuni pada 5 (lima) kecamatan yang berada di kepulauan, rawan terhadap bencana alam laut, berupa gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Gangguan impulsif tersebut bisa berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsor.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kejadian tersebut dengan membangun infrastruktur yang tahan terhadap gangguan tersebut dan membuat tanggul hijau (penanaman Mangrove), pembangunan umum dan infrastruktur yang dibutuhkan dengan ketentuan teknis yang ramah gelombang pasang dilengkapi bangunan/tanaman penahan tsunami, jalan dan bangunan penyelamat.

Ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang menuntut adanya penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal ini untuk mencegah dampak dari pemanfaatan ruang yang tidak tepat pada daerah tertentu misalnya pemanfaatan kawasan longsor, pembangunan di daerah penyanggah/*buffer zone* (sempadan sungai, hutan bakau, dll). Dampak Pemanfaatan Ruang yang tidak tepat antara lain



berakibat pada hilangnya fungsi lindung hidrolis kawasan, menurunnya kemampuan peresapan air, ancaman banjir terhadap bangunan di bantaran sungai, hilangnya daerah *buffer*/penyanggah, dll.

Salah satu bentuk sinergitas program antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah dengan pembangunan mitigasi bencana non fisik yang dibuat dalam bentuk penyusunan dokumen yang dinamakan Dokumen Kajian Risiko Bencana. Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menganalisa tingkat ancaman, kerentanan, dan kapasitas daerah. Penyusunan kajian risiko bencana ini dapat membantu dalam mendukung analisa kejadian bencana, penentuan upaya penanggulangan bencana serta sebagai acuan dalam perencanaan daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga integrasi dapat berjalan optimal.

b. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan turunannya telah menimbulkan perubahan mendasar terhadap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain :

1. Adanya payung hukum, mandat bagi perlindungan rakyat dari risiko bencana;
2. Perubahan cara pandang dari responsif menjadi pengurangan risiko dan kesiapsiagaan;
3. Terintegrasinya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan;
4. Penanggulangan bencana diatur, diselenggarakan dan dibiayai oleh anggaran pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
5. Konsekuensi logis untuk membentuk kelembagaan yang kuat dan semesta;



6. Mengatur tentang hak dan kewajiban rakyat, serta keterlibatan berbagai pihak sebagai penyelenggara penanggulangan bencana.

Salah satu yang dirumuskan berdasarkan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana adalah adanya sistem penanggulangan bencana yang terdiri dari beberapa komponen, antara lain :

1. *Komponen legislasi*, mencakup dasar-dasar kebijakan yang terkait dengan penanggulangan bencana beserta turunan-turunannya dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota.
2. *Komponen kelembagaan*, terkait dengan kedudukan, struktur, tugas pokok dan kewenangan badan penanggulangan dari tingkat nasional, sampai dengan Kabupaten/Kota.
3. *Komponen perencanaan*, terkait dengan program penanggulangan bencana dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu “*mainstream*” dalam perencanaan pembangunan. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana sebagai perspektif dalam perencanaan.
4. *Komponen pendanaan*, terkait dengan penganggaran dari tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan upaya penanggulangan bencana, sumber dana bisa berasal dari berbagai sumber, dengan tetap memegang prinsip untuk tidak mempergunakan dana-dana yang bisa menimbulkan kerentanan baru, misalnya dana pinjaman luar negeri, dan dari perusahaan yang mempunyai kontribusi merusak lingkungan. Di sisi lain pendanaan dan program ini harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
5. *Pengembangan kapasitas*, disemua komponen penyelenggara penanggulangan bencana baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam semua fase baik pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana merupakan “urusan bersama”, semua sektor/lini, dan tiap-tiap komponen dalam sistem penanggulangan bencana memiliki kontribusi yang sama pentingnya



terhadap kesuksesan upaya penanggulangan bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota semakin memperjelas tugas, pokok, dan fungsi BPBD.

Masalah yang ditemui sampai saat ini adalah belum optimalnya upaya penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multi dimensi memerlukan peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dan manajemen kebencanaan belum berfungsi secara optimal sehingga berdampak pada belum optimalnya pelayanan penanganan bencana kepada masyarakat.

c. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada masa yang akan datang serta dengan memperhitungkan faktor-faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta *stakeholder* lainnya, maka dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 - 2030 dicanangkan Visi Kabupaten Kepulauan Selayar “**Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera**”, dengan 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan adaptif;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
3. Meningkatkan pengelolaan perekonomian daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya perdesaan;
5. Meningkatkan proporsi pembangunan infrastruktur wilayah;
6. Meningkatkan pembinaan sosial, budaya dan agama ;
7. Meningkatkan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung/menyukseskan Visi/Misi Bupati tersebut khususnya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPBD



Kabupaten Kepulauan Selayar, dituangkan dalam program kegiatan lima tahun ke depan, namun demikian pelaksanaannya masih terkendala pada:

1. Keterbatasan kualitas SDM Aparatur kebencanaan;
2. Keterbatasan dari segi anggaran;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan penanganan kebencanaan;
4. Keterbatasan SDM Masyarakat (relawan bencana) dalam hal pengetahuan penanganan kebencanaan.

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mewujudkan misi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2030, tercantum pada Misi 1 dan Misi 2 yaitu :

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan yang mengandung makna tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang mengandung makna tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

d. **Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah**

 Tantangan

Pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan penanggulangan bencana antar pemangku kepentingan harus didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana.

Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak awal dalam hal keterpaduan dan keseragaman data dan informasi serta tingkat risiko bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten



Kepulauan Selayar dalam rangka mengurangi risiko-risiko tersebut melalui program kegiatan akan terfokus dan sesuai dengan prioritas dengan melibatkan potensi, sumberdaya serta anggaran yang diperlukan dalam penanggulangan bencana.

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

- a. Tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar dikategorikan sedang sesuai data Indeks Risiko Bencana Indonesia.
- b. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian untuk penanggulangan bencana lebih condong hanya pemerintah saja;
- c. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
- d. koordinasi, kolaborasi dan sinergitas antar *stakeholders* belum optimal sehingga budaya akan sadar bencana masih belum terlaksana dengan baik;
- e. perkembangan teknologi informasi yang pesat di era digital ini yang menuntut penyebaran informasi bencana dan pelaporan informasi kebencanaan sudah menggunakan aplikasi berbasis elektronik sehingga sumber daya manusia kebencanaan sudah harus mampu memanfaatkan teknologi informasi yang mumpuni.
- f. Belum optimalnya kualitas sumber daya pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana;
- g. Sumberdaya manusia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal pemberian pendidikan dan pelatihan berbasis kebencanaan masih



terbatas sehingga kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sangat luas.

Peluang

Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana mempunyai beberapa peluang untuk dapat dijadikan program yang penting dan prioritas, seperti berikut ini :

1. Adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 beserta peraturan pemerintah pendukungnya termasuk peraturan daerah, peluang untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat luas, tidak hanya terbatas pada pemerintah, namun juga dari masyarakat dan kalangan dunia usaha;
2. Adanya undang-undang nomor 23 tahun 2014 beserta peraturan pemerintah pendukungnya berdampak pada penguatan peran BPBD Kabupaten/Kota;
3. Dibangunnya sistem penanggulangan bencana secara nasional memungkinkan seluruh BPBD mempunyai kompetensi dan kapasitas yang sama dan sesuai standar kualifikasi;
4. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana melalui kementerian/lembaga teknis;
5. Mekanisme penganggaran di APBD melalui dana belanja tidak terduga dan peluang belanja (Dana Alokasi Khusus Bencana) oleh Pemerintah Pusat;
6. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan lain-lain.
7. Penyusunan aplikasi sistem informasi untuk menyimpan dan mengelola data kebencanaan baik kerawanan, kerentanan, kapasitas penanggulangan bencana secara baik;



8. Bimbingan dan pelatihan teknis untuk relawan dan masyarakat peduli bencana dan diuji melalui gladi lapang/gladi kesiapsiagaan bencana secara periodik;
9. Perlunya pengarusutamaan paradigma pengurangan risiko bencana kepada pemangku kepentingan agar kesiapan menghadapi bencana dilakukan pada tahap pra bencana;
10. Bimbingan dan pelatihan penyusunan SOP serta indikator kinerja dalam pengelolaan penanggulangan bencana.

e. Penentuan Isu – Isu Strategis

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar maka isu–isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Penguatan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui pengurangan risiko bencana dan peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- b. Optimalisasi pelayanan informasi rawan bencana secara terintegrasi, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. Peningkatan peran dan fungsi lembaga terhadap upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Aktualisasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana secara menyeluruh.
- e. Peningkatan kapasitas SDM Kebencanaan sebagai aset/modal berharga yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui peningkatan kompetensinya.



2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

- **Proses yang dilakukan dalam membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan**

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam prioritas penanganan bencana meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran pada rancangan awal RKPD sebesar Rp. 3.409.164.540,- sedangkan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 3.496.425.000,-
2. Program Penanggulangan Bencana dengan alokasi anggaran pada rancangan awal RKPD sebesar Rp. 1.164.560.439,- sedangkan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 1.188.319.000,-

- **Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan yakni :**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ingin dicapai :
Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penanggulangan Bencana yang ingin dicapai :
Persentase warga negara yang mendapat layanan kebencanaan (Pra Bencana, Tanggap darurat, dan pascabencana).

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 tertuang dalam tabel 2.3 sebagai berikut :



Tabel 2.3
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					4.573.724.979,-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					4.684.744.000,-
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.409.164.540,-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.496.425.000,-
	A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				27.500.000,-	A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19.801.000,-
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Selayar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	5.040.000,-	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Selayar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	6.979.000,-
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	2.500.000,-	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	2.300.000,-
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	1 Dokumen	2.500.000,-	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	1 Dokumen	2.300.000,-



					dokumen perubahan RKA – SKPD						dokumen perubahan RKA - SKPD				
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah dokumen DPA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	1 Dokumen	2.500.000,-		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah dokumen DPA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	1 Dokumen	2.300.000,-	
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA - SKPD	1 Dokumen	2.500.000,-		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA - SKPD	1 Dokumen	2.300.000,-	
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	5.500.000,-		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	1.297.000,-	
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	6.960.000,-		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	2.325.000,-	
	B.	Administrasi Keuangan							B.	Administrasi Keuangan					2.020.200.000,-
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kep. Selayar	Jumlah orang yang menerimagaji dan tunjangan ASN	19 Orang/ bulan	2.018.172.535,-		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kep. Selayar	Jumlah orang yang menerimagaji dan tunjangan ASN	19 Orang/ bulan	2.000.000.000,-	



		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.500.000,-		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0,-	
		3	Koordinasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	15.500.000,-		3	Koordinasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	11.000.000,-	
		4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	3.000.000,-		4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.000.000,-	
		5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	0,-		5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.200.000,-	
	C.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah					14.000.000,-		C.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah					3.570.000,-
		1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	14.000.000,-		1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3.570.000,-	
	D.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					30.000.000,-		D.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					86.386.000,-
		1	Pendidikan dan Pelatihan pegawai	Kab. Kep. Selayar	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 Orang	30.000.000,-		1	Pendidikan dan Pelatihan pegawai	Kab. Kep. Selayar	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang	86.386.000,-	



			berdasarkan tugas dan fungsi							berdasarkan tugas dan fungsi				
	E.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					380.585.000,-	E.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					237.116.000,-
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	10.000.000,-		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	3.242.000,-	
	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang di sediakan	30 Paket	7.000.000,-		2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang di sediakan	Paket	0,-	
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	13.000.000,-		3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	9.996.000,-	
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Dokumen	0,-		4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	5 Dokumen	3.000.000,-	
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	350.585.000,-		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	220.878.000,-	
	F.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					42.000.000,-	F.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					20.000.000,-
	1	Pengadaan Mebel	Kab. Kep.	Jumlah paket mebel yang	20 Unit	15.000.000,-		1	Pengadaan Mebel	Kab. Kep.	Jumlah paket mebel yang	15 Unit	10.000.000,-	



			Selayar	Disediakan					Selayar	disediakan					
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	9 Unit	27.000.000,-		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit	10.000.000,-	
	G.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					582.003.800,-		G.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					872.112.000,-
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,-		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,-	
		2	penyediaan jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrk	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrk yang disediakan	1 Laporan	135.003.800,-		2	penyediaan jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrk	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrk yang disediakan	1 Laporan	209.360.000,-	
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	437.000.000,-		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	662.752.000,-	
	H.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					294.903.205,-		H.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					237.240.000,-
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	49.903.205,-		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	42.130.000,-	



		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20 Unit	195.000.000,-		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20 Unit	157.270.000,-
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	14 Unit	25.000.000,-		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	14 Unit	18.840.000,-
		4	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 Unit	25.000.000,-		4	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 Unit	19.000.000,-
II.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						1.164.560.439,-	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						1.188.319.000,-
	A.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					86.080.000,-	A.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					53.613.000,-
		1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Kep. Selayar	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi sesuai	100 Orang	86.080.000,-		1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Kep. Selayar	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi sesuai	100 Orang	53.613.000,-



					jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 tahun						jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 tahun				
	B.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				346.080.100,-	B.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				589.706.000,-			
		1	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah resiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) kabupaten/kota yang tertangani	1 Kegiatan		100.000.000,-		1	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah resiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) kabupaten/kota yang tertangani	1 Kegiatan	42.325.000,-
		2	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu, warga negara, keluarga, maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	160 Unit		109.500.000,-		2	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu, warga negara, keluarga, maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	175 Unit	132.570.000,-
		3	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana dan	Orang		0,-		3	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana dan	87 Orang	100.000.000,-



				prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman Kabupaten/Kota						prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman Kabupaten/Kota				
		4	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	3 Kawasan	100.000.000,-		4	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	3 Kawasan	38.045.000,-
		5	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) Kabupaten.Kota yang berasal lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	10 Orang	36.580.100,-		5	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) Kabupaten.Kota yang berasal lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	40.553.000,-



		6	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0,-		6	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	130.000.000,-	
		7	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan	0,-		7	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Laporan	50.000.000,-	
		8	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan	Kawasan	0,-		8	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan	2 Kawasan	56.213.000,-	



				pengecahan dan mitigasi bencana						pengecahan dan mitigasi bencana			
	C.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				300.000.000,-	C.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				360.000.000,-	
	1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen SE Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	1 Dokumen	0,-	1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen SE Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	1 Dokumen	11.000.000,-	
	2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	50 Orang	47.500.000,-	2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	50 Orang	34.000.000,-	
	3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan Keadaan darurat Kabupaten/kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan	4 Orang	39.000.000,-	3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan Keadaan darurat Kabupaten/kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat	3 Orang	25.000.000,-	



					penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis						dalam aspek manajerial dan teknis				
		4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	50 Orang	98.500.000,-		4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Orang	200.000.000,-	
		5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	115.000.000,-		5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	90.000.000,-	
	D	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					432.400.239,-		D	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					185.000.000,-
		1	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah data dan informasi kebencanaan	1 Dokumen	57.000.000,-		1	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah data dan informasi kebencanaan	1 Dokumen	35.000.000,-	
		2	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Penyelesaian kegiatan Pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan rencana	1 Kegiatan	375.400.239,-		2	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Penyelesaian kegiatan Pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan	1 Kegiatan	150.000.000,-	



					Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana (R3P) kabupaten/kota yang dilegalkan							rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana (R3P) kabupaten/kota yang dilegalkan			
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat untuk program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak ada usulan program baik dari kelompok masyarakat, LSM dan dari pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota.

Tabel. 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan pada tahun 2026 seperti pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak ada.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu ***“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”*** mengandung pengertian sebagai berikut : Mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan Sejahtera, adil, berdaulat, dan berdaya saing global, dengan menciptakan Pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi, menuju peringatan 100 tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Tahun 20 Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional Pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut 8 (delapan) prioritas nasional tersebut sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra industry melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan dan pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;



7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Dalam RPJMN 2025-2029, arah Pembangunan 5 tahun kedepan focus pada Trisula Pembangunan. Trisula Pembangunan tersebut adalah Penurunan kemiskinan, Peningkatan SDM Indonesia yang berkualitas, Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD). Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah ***“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***. Selain akselerasi pertumbuhan ekonomi, RKP Tahun 2025 juga berfokus pada : (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, (2) Konvergensi atau pertumbuhan yang merata antar daerah, (3) Penurunan Kemiskinan, (4) Penurunan Tingkat pengangguran terbuka, (5) Peningkatan SDM Indonesia yang berkualitas, (6) Memantapkan ketahanan social budaya dan ekologi.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 17 (Tujuh Belas) program prioritas pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut :

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. Menyelenggarakan system penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;



4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan Pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak Perempuan, anak serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin Pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan Pembangunan IKN serta kota-kota inovatif karakteristik mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah;
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah yang menangani urusan kebencanaan maka sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-undang nomor 24 tahun 2007 maka BNPB harus mampu mengoptimalkan peran koordinasi penanggulangan bencana dipusat dan daerah. Selain itu BNPB akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana



serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi “**Bangsa yang Tangguh Dalam Menghadapi Bencana**” secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu, misi BNPB dirumuskan sebagai berikut :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar kementerian, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam BNPB sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

Berikut adalah fokus capaian Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2025-2029 dalam peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044 yang perlu di capai melalui RENAS PB Tahun 2025-2029 sebagai berikut :



Tabel 1.2 Fokus Capaian 2025-2029 dalam Peta Jalan Pelaksanaan RIPB
Tahun 2020-2044

KEBIJAKAN	STRATEGI	FOKUS CAPAIAN 2025-2029
1. Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	a. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan. b. Meningkatkan kualitas NSPK penanggulangan bencana	1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana. 2. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan. 3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman.
2. Peningkatan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, akademisi, Lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana. b. Mewujudkan dan meningkatkan system peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data.	4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan. 5. Terwujudnya tata Kelola risiko bencana yang sinergitas antara pusat dan daerah. 6. Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat.
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan Kawasan	a. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan Kawasan. b. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai	7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi. 8. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ang bketahanan



	<p>skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana.</p> <p>c. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana.</p>	<p>bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial, dan ketahanan Kesehatan masyarakat.</p> <p>9. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana.</p>
<p>4. Penguatan tata Kelola penanggulangan bencana yang semakin professional, transparan, dan akuntabel</p>	<p>a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggaraan dan pelaku penanggulangan bencana.</p> <p>b. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana.</p> <p>c. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana.</p> <p>d. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata Kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas.</p> <p>e. Mewujudkan Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan, dan masyarakat Tangguh bencana.</p> <p>f. Mewujudkan sarana dan prasarana yang Tangguh terhadap bencana.</p> <p>g. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana</p>	<p>10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.</p> <p>11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.</p> <p>12. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan Tangguh bencana.</p>



	kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.	
5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana. b. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana. c. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana. d. Menguatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. e. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital 	
6. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana. b. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik. c. Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana. d. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. 	



Visi dan misi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana di padukan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam kedudukannya sebagai unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan visi instansi yaitu: ***“Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter”***.

Dengan mengacu pada visi yang telah ditetapkan, maka misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

1. Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif;
2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas an aksibel;
3. Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif;
4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif, dan berkarakter;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra perangkat daerah. Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan.
- b. Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah

Tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya nilai SAKIP;
- b. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan laporan keuangan pemerintah perangkat daerah sesuai SAP;
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.



3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Kegiatan adalah media untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang akan dilakukan untuk menilai tingkat capaian keberhasilan sasaran dan tujuan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan tugas dan fungsinya membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, pada dasarnya program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai komando, koordinasi dan pelaksana dalam penanggulangan bencana. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pelayanan penanggulangan bencana dapat diatasi sesuai dengan dukungan sumberdaya yang tersedia dan memadai.

Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang direncanakan untuk Periode Tahun 2026 sebagaimana tertuang pada tabel 3.1.



Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2026
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATA TAN PEN TING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Capaian Kinerja		100%	3.409.164.540,-			100%	3.750.080.994,-
						Persentase Capaian Kinerja Keuangan		100%				100%	
1	5	01	2.01		A. Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen atau laporan perencanaan, pengangan dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu		100%	27.500.000,-			100%	30.250.000,-



1	5	01	2.01	0001	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkatdaerah	Kab. Kepulauan Selayar	2 Dokumen	5.040.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	5.544.000,-
1	5	01	2.01	0002	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	2.500.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.750.000,-
1	5	01	2.01	0003	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	2.500.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.750.000,-
	5	01	2.01	0004	4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	2.500.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.750.000,-
1	5	01	2.01	0005	5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA - SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	2.500.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.750.000,-



1	5	01	2.01	0006	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	5.500.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Laporan	6.050.000,-
1	5	01	2.01	0007	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Kepulauan Selayar	4 Laporan	6.960.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	4 Laporan	7.656.000,-
1	5	01	2.02		B. Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan Administrasi keuangan perangkat daerah		100%	2.038.172.535,-		100%	2.241.989.788,-
1	5	01	2.02	0001	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Selayar	19 Orang/ Bulan	2.018.172.535,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	19 Orang/ Bulan	2.219.989.788,-
1	5	01	2.02	0003	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi	Kab. Kepulauan Selayar	12 Dokumen	1.500.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi	1 Dokumen	1.650.000,-



					SKPD	Keuangan SKPD				Umum			
1	5	01	2.02	0005	5 Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuanganakhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	15.500.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Laporan	17.050.000,-	
1	5	01	2.02	0006	6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	3.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.300.000,-	
1	5	01	2.03		C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah		100%	14.000.000,-		100%	15.400.000,-	
1	5	01	2.03	0006	4 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	12 Laporan	14.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	12 Laporan	15.400.000,-	
1	5	01	2.05		D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	30.000.000,-		100%	33.000.000,-	
1	5	01	2.05	0009	4 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	Kab.			Dana Transfer			



					Berdasarkan Tugas dan Fungsi	dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kepulauan Selayar	6 Orang	30.000.000,-	Umum, Dana Alokasi Umum		5 Orang	33.000.000,-
1	5	01	2.06		E. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	380.585.000,-			100%	418.643.500,-
1	5	01	2.06	0001	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Paket	10.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		1 Paket	11.000.000,-
1	5	01	2.06	0003	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	30 Paket	7.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		30 Paket	7.700.000,-
1	5	01	2.06	0005	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Paket	13.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		1 Paket	14.300.000,-
1	5	01	2.06	0006	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	0,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0,-
1	5	01	2.06	0009	8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 laporan	350.585.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		1 laporan	385.643.500,-



1	5	01	2.07		F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	42.000.000,-			100%	46.200.000,-
1	5	01	2.07	0005	1 Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	20 Unit	15.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		9 Unit	16.500.000,-
1	5	01	2.07	0006	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	9 Unit	27.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		9 Unit	29.700.000,-
1	5	01	2.07	0010	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Unit	0,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		1 Unit	0,-
1	5	01	2.08		G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	582.003.800,-			100%	640.204.180,-
1	5	01	2.08	0001	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	10.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		1 Laporan	11.000.000,-
1	5	01	2.08	0002	2 penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrk	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrk yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	135.003.800,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		1 Laporan	148.504.180,-



1	5	01	2.08	0004	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	437.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Laporan	480.700.000,-
1	5	01	2.09		H. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	294.903.205,-		100%	324.393.525,-
1	5	01	2.09	0001	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Kepulauan Selayar	1 Unit	49.903.205,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Unit	54.893.525,-
1	5	01	2.09	0002	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Kepulauan Selayar	20 Unit	195.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	20 Unit	214.500.000,-
1	5	01	2.09	0006	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Kepulauan Selayar	14 unit	25.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	14 unit	27.500.000,-



1	5	01	2.09	0009	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Kab. Kepulauan Selayar	1 Unit	25.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Unit	27.500.000,-
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100%	1.164.560.439,-		100%	1.281.016.483,-
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana								
				Persentase warga negara yang mendapatkan penyelamatan dan evakuasi korban bencana								
1	05	03	2.01		A. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100%	86.080.000,-		100%	94.688.000,-



1	05	03	2.01	0002	1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, informasi, dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kab. Kepulauan Selayar	100 Orang	86.080.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	85 Orang	94.688.000,-
1	05	03	2.02		B. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%	346.080.100,-		100%	380.688.110,-
1	05	03	2.02	0013	3 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kab. Kepulauan Selayar	1 Kegiatan	100.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	110.000.000,-



1	05	03	2.02	0015	3 Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu, warga negara, keluarga, maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Kab. Kepulauan Selayar	160 unit	109.500.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	160 unit	120.450.000,-
1	05	03	2.02	0020	1 Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kab. Kepulauan Selayar	3 Kawasan	100.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	3 Kawasan	110.000.000,-
1	05	03	2.02	0021	2 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kab. Kepulauan Selayar	10 Orang	36.580.100,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	10 Orang	40.238.110,-
1	05	03	2.02	0026	5 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	0,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Laporan	0,-



1	05	03	2.02	0028	4 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kab. Kepulauan Selayar	2 Kawasan	0,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	2 Kawasan	0,-
1	05	03	2.03		C. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang mendapatkan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100%	300.000.000,-		100%	330.000.000,-
1	05	03	2.03	0002	1 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Sk penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	0,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	0,-
1	05	03	2.03	0003	2 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	Kab. Kepulauan Selayar	50 Orang	47.500.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	50 Orang	52.250.000,-
1	05	03	2.03	0008	3 Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang	Kab. Kepulauan Selayar	4 Orang	39.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	4 Orang	42.900.000,-



					Kabupaten/Kota	memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis							
1	05	03	2.03	0004	4 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kab. Kepulauan Selayar	50 Orang	98.500.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		50 Orang	108.350.000,-
1	05	03	2.03	0005	5 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	115.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		1 Laporan	126.500.000,-
1	05	03	2.04		D. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang mendapatkan penataan sistem dasar penanggulangan bencana			432.400.239,-				475.640.263,-
1	05	03	2.04	0004	1 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah data dan informasi kebencanaan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	57.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	62.700.000,-
1	05	03	2.04	0010	2 koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai	Kab.			Dana Transfer			



					berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) kabupaten/kota yang Dilegalkan	Kepulauan Selayar	1 Kegiatan	375.400.239,-	Umum, Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	412.940.263,-
JUMLAH						4.573.724.979,-			5.031.097.477,-			



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun Anggaran 2026 merencanakan Program Kerja (Renja) sebanyak 2 (dua) Program dengan 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 41 (Empat Puluh Satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 4.684.744.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)** yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- 3) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- 4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;



e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Mebel;
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 2) Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota

- 1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (per jenis Bencana).

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana

- 1) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota;
- 2) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota;
- 3) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota;
- 4) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- 5) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/kota;



- 6) Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota;
- 7) Pengendalian Operasional dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota;
- 8) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- 1) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota;
- 2) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota;
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan keadaan darurat abupaten/Kota;
- 4) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
- 5) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- 1) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;
- 2) Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota.

Adapun Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut :



Tabel 4.1
RENCANA KERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2026

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
1	5	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Capaian Kinerja		100%	3.496.425.000,-		100%	3.846.067.500,-
						Persentase Capaian Kinerja Keuangan		100%			100%	
1	5	01	2.01		A. Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan Penggangan, dan Evaluasi kinerja perangkatdaerah yang di susun		100%	19.801.000,-		100%	21.781.100,-
1	5	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah dokumen perencanaan perangkatdaerah	Kab. Kepulauan Selayar	2 Dokumen	6.979.000,-	Dana Transfer	2 Dokumen	7.676.500,-



					Daerah					Umum, Dana Alokasi Umum		
1	5	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	2.300.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.530.000,-
1	5	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	2.300.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.530.000,-
1	5	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	2.300.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.530.000,-
1	5	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA - SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	2.300.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.530.000,-



1	5	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	1.297.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Laporan	1.426.700,-
1	5	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasikinerja perangkat daerah	Kab. Kepulauan Selayar	3 Laporan	2.325.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	4 Laporan	2.325.500,-
1	5	01	2.02		B. Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan Administrasi keuanganperangkat daerah		100%	2.020.200.000,-		100%	2.222.220.000,-
1	5	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Selayar	19 Orang/Bulan	2.000.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	19 Orang/bulan	2.200.000.000,-
1	5	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuanganakhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	11.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Laporan	12.100.000,-



1	5	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	4.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4.400.000,-
1	5	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	5.200.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.720.000,-
1	5	01	2.03		C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah		100%	3.570.000,-		100%	3.927.000,-
1	5	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	12 Laporan	3.570.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	12 Laporan	3.927.000,-
1	5	01	2.05		D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	86.386.000,-		100%	95.024.600,-
1	5	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kepulauan Selayar	5 Orang	86.386.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	5 Orang	95.024.600,-



1	5	01	2.06		E. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	237.116.000,-		100%	260.827.600,-
1	5	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Paket	3.242.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Paket	3.566.200,-
1	5	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Paket	9.996.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Paket	10.995.600,-
1	5	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	5 Dokumen	3.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	3.300.000,-
1	5	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 laporan	220.878.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 laporan	242.965.800,-
1	5	01	2.07		F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	20.000.000,-		100%	22.000.000,-



1	5	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	15 Unit	10.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	9 Unit	11.000.000,-
1	5	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	2 Unit	10.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	9 Unit	11.000.000,-
1	5	01	2.08		G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	872.112.000,-		100%	959.323.200,-
1	5	01	2.08	0002	penyediaan jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrk	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrk yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	209.360.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Laporan	230.296.000,-
1	5	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	662.752.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Laporan	729.027.200,-
1	5	01	2.09		H. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	237.240.000,-		100%	260.964.000,-



						Daerah						
1	5	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Kepulauan Selayar	1 Unit	42.130.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Unit	46.343.000,-
1	5	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Kepulauan Selayar	20 Unit	157.270.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	20 Unit	172.997.000,-
1	5	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Kepulauan Selayar	14 unit	18.840.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	14 unit	20.724.000,-
1	5	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Kab. Kepulauan Selayar	1 Unit	19.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Unit	20.900.000,-
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana						



						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%	1.188.319.000,-		100%	1.307.150.000,-
						Persentase warga negara yang mendapatkan penyelamatan dan evakuasi korban bencana						
1	05	03	2.01		A. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100%	53.613.000,-		100%	58.974.300,-
1	05	03	2.01	0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, informasi, dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kab. Kepulauan Selayar	100 Orang	53.613.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	100 Orang	58.974.300,-



1	05	03	2.02		B. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%	589.706.000,-		100%	648.676.600,-
1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kab. Kepulauan Selayar	1 Kegiatan	42.325.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	46.557.500,-
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu, warga negara, keluarga, maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Kab. Kepulauan Selayar	175 Unit	132.570.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	175 Unit	145.827.000,-
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana dan prasarana dalam pengendalian operasi	Kab. Kepulauan Selayar	87 Orang	100.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	87 Orang	110.000.000,-



						penanganan darurat bencana (per jenis ancaman Kabupaten/Kota)						
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kab. Kepulauan Selayar	3 Kawasan	38.045.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	3 Kawasan	41.849.500,-
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Kab. Kepulauan Selayar	30 Orang	40.553.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	30 Orang	44.608.300,-
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	130.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	143.000.000,-



						dalam 1(satu) tahun						
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	50.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Laporan	55.000.000,-
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kab. Kepulauan Selayar	2 Kawasan	56.213.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	95 Orang	61.834.300,-
1	05	03	2.03		C. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang mendapatkan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100%	360.000.000,-		100%	396.000.000,-
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SE Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 Jam	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	11.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	12.100.000,-



						berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat						
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	Kab. Kepulauan Selayar	50 Orang	34.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	45 Orang	37.400.000,-
1	05	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Kab. Kepulauan Selayar	3 Orang	25.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	3 Orang	27.500.000,-
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kab. Kepulauan Selayar	100 Orang	200.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	100 Orang	220.000.000,-
1	05	03	2.03	00011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	90.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Laporan	99.000.000,-



1	05	03	2.04		D. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang mendapatkan penataan sistem dasar penanggulangan bencana			185.000.000,-		100%	203.500.000,-
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah data dan informasi kebencanaan yang tersedia	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	35.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	38.500.000,-
1	05	03	2.04	0010	koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) kabupaten/kota yang dilegalkan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Kegiatan	150.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	165.000.000,-
JUMLAH									4.684.744.000,-			5.153.218.400,-



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah kebijakan, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari visi dan misi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 - 2030.

Dengan melaksanakan Rencana Kerja ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan manifestasi tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1.Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang menghubungkan antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :



1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
 - a) Melaksanakan penyusunan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsinya agar senantiasa bekerja bersama sesuai dengan standar operasional prosedur untuk menghasilkan formulasi kebijakan dalam penanggulangan bencana yang diimplementasikan dalam bentuk target kinerja dan realisasi sesuai kaidah dan aturan yang berlaku;
 - b) Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya, akan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026.

1.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan Peraturan Kepala Daerah, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026, dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Akhir kata semoga Rencana Kerja Badan Peppnanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 17 Maret 2025

KEPALA PELAKSANA BPBD,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, MM.Pub

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19700726 199101 1 002

